

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika kini menjadi persoalan yang penting dalam komunikasi politik. Etika komunikasi sering terpinggirkan karena etika komunikasi belum membudaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma yang tumbuh dalam suatu masyarakat mempengaruhi cara komunikasi seseorang, hal ini berkaitan dengan budaya yang dimilikinya. Budaya menkonstruksi cara berpikir dan menentukan cara seseorang melihat baik-buruknya suatu tindakan. Dalam hal ini, Etika menentukan idealnya proses dialog dengan menghargai lawan bicara, toleransi terhadap perbedaan serta menghargai integritas.

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting bagi semua orang, baik pejabat publik, pemimpin partai maupun warga negara biasa (Wardhani, 2017). Komunikasi menjadi kebutuhan manusia, ia terjadi dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja sehingga komunikasi tidak dapat dihindari. Setiap orang baik secara langsung atau tidak pasti akan terlibat dalam aktivitas politik, bukan hanya melalui proses pemilihan umum tetapi melalui banyak cara salah satunya media massa. Informasi mengenai politik sering sekali muncul di media massa dengan menampilkan sejumlah narasumber yang berkompeten dibidangnya. Pejabat publik baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran yang besar dalam menyampaikan komunikasi

politik sebagai jalan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagaimana aktivitas politik dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat (Tabroni, 2012). Sebuah kepentingan politik tidak mungkin berjalan dengan lancar apabila tidak disertai aktivitas komunikasi politik yang baik. Maka dari itu, semuanya bergantung kepada kecerdasan pejabat publik, ia yang memiliki peran dalam mengemas pesan-pesan politik yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Dalam TAP MPR NO.VI Tahun 2001 tentang “Etika Kehidupan Berbangsa” sudah diatur bagaimana seharusnya pejabat publik bertindak dalam ruang publik. Ia harus mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki sikap yang bertata krama dalam berperilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik. Tidak manipulatif dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji lainnya. Dalam interaksi politik dibutuhkan norma-norma agar tercipta komunikasi yang ideal. Salah satu perwujudannya adalah melalui etika komunikasi. Etika komunikasi politik merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Adanya etika komunikasi politik bukan bermaksud menceramahi pejabat publik tetapi menjadi tuntutan moral bagi pejabat publik untuk melakukan komunikasi politik berdasarkan sistem nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Pejabat publik menjadi representatif masyarakat yang duduk di kursi pemerintahan yang seharusnya memiliki tutur kata yang baik dalam menyampaikan pendapat. Dalam berkomunikasi pejabat publik harus sadar ia berada diruang publik sehingga ia mampu menghasilkan komunikasi politik

yang mencerahkan, penuh keadilan dan tertib. Jangan sampai pesan yang disampaikan menimbulkan ketidakberaturan dan kesalahpahaman bagi masyarakat.

Etika komunikasi politik menjadi sorotan ditengah masyarakat, hal ini karena gaya bicara sebagian Anggota DPR yang tidak menampilkan wajah keteladanan yang baik dalam berkomunikasi. Melalui media massa dalam program gelar wicara “Mata Najwa” Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan saat berdebat dengan Emil Salim dinilai tidak beretika. Pesan- pesan disampaikan dengan nada yang keras dan kasar, terlihat begitu emosional. Masyarakat dapat menilai secara terbuka bagaimana Arteri Dahlan berbicara dengan nada tinggi, menggunakan gerakan-gerakan non-verbal terlihat sangat tidak sopan. Pendiri Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC), Saiful Mujani, mengatakan, sikap yang ditunjukkan Arteria tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik. Seharusnya setiap pejabat publik menunjukkan sikap baik, setidaknya ketika berbicara di hadapan publik (Kompas.com, 2019).

Selain itu, gaya bicara Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR RI saat menjadi narasumber dalam acara “Mata Najwa” juga menjadi perhatian masyarakat. Fahri Hamzah terkesan tidak berusaha membangun komunikasi yang baik, pertanyaan tidak dijawab secara tepat, pembicaraan dibawa kemana-mana, dan menyalahkan orang lain seolah-olah dirinya bukan bagian dari pemerintahan. Seharusnya ia harus mampu memberikan pesan-pesan yang berisi solusi dan tanggungjawab untuk menjawab keresahan yang ada di masyarakat.

Dalam berkomunikasi bukan hanya isi pesannya saja yang harus diperhatikan tetapi metode atau cara penyampaian juga sangatlah penting. Penampilan, tekanan suara, gerakan nonverbal, tatapan mata dan raut wajah sangat mempengaruhi isi pesan. Jangan sampai komunikasi menjadi bingung dan salah mengartikan isi pesan yang disampaikan. Dalam hal ini pejabat publik yang mewakili pemerintah melalui perannya dalam struktur sosial, dituntut untuk memiliki etika komunikasi politik yang baik.

Dalam menjalankan fungsinya, komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari media yang merupakan jembatan pemerintah dengan masyarakat. Media sebagai saluran komunikasi politik memiliki keluasan jangkauan dan pengaruh yang besar dalam pemberitaan terkait aktivitas politik. Melalui media, masyarakat dapat mengontrol kinerja pejabat publik, yang duduk dikursi legislatif. Begitupun sebaliknya, pemerintah dapat memberikan pertanggungjawabannya melalui komunikasi politik. Pola pemberitaan media massa dalam konteks politik telah memberikan pelajaran kepada publik tentang arti politik sebagai bentuk pendidikan politik yang dilakukan media massa kepada publik.

Penelitian yang relevan mengenai etika komunikasi politik pejabat publik di media massa adalah hasil penelitian Roni Tabroni dengan judul “Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa”. Penelitian ini mengungkapkan adanya perilaku tidak etis yang dilakukan para politisi, dimana pejabat publik berusaha untuk merekayasa media. Bagaimana sebuah pesan politik bisa sampai kepada publik, sangat tergantung kepada sejauh mana para komunikator politik bisa menyertakan media

massa dalam setiap aktivitas komunikasi politiknya. Dalam konteks inilah media massa menjadi sangat penting untuk kepentingan komunikasi politik.

Ditemukan juga penelitian yang terkait dengan etika komunikasi politik pejabat publik dengan judul, “Urgensi Etika dalam Komunikasi Politik”. Hasil penelitian mengungkapkan etika komunikasi diperlukan untuk melindungi publik yang lemah. Komunikator politik memang berhak dan bebas berpendapat tanpa takut terhadap setiap tekanan dari pihak manapun. Namun, setiap pribadi maupun kelompok atau media tertentu hendaklah memiliki kekuatan pengendalian dalam menyampaikan pendapatnya. Temuan ini semakin memperjelas bahwa masih minimnya pengetahuan tentang etika dalam komunikasi politik bagi pejabat publik. Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti etika komunikasi politik pejabat publik khususnya Anggota DPR dalam program gelar wicara “Mata Najwa”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka penelitian ini berfokus pada etika komunikasi politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini menganalisis etika komunikasi politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam program Mata Najwa periode Juli-Desember 2019.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, terdapat beberapa pertanyaan yang akan ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana etika komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam program acara “Mata Najwa”?
2. Apakah yang mempengaruhi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan komunikasi politik?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan ilmu komunikasi khususnya pada kajian komunikasi politik yang berkaitan dengan etika komunikasi pejabat publik di media massa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi pejabat publik dalam melakukan komunikasi politik.